Kebijakan Urbanisasi Dan Pertumbuhan Kota di Indonesia

Roni Ekha Putera[1]

Abstract:

Urbanization as effect of development growth city process. Urbanization generate city proplems in education, health, social and other sector.Actually the urbanization doesn't take to prevent but have to rearrange and managed, cause urbanization growth so rapidly and affected city economic growth. This article contaiht isues, theory and how to manage the urbanization.

Pendahuluan

Persoalan urbanisasi dan pertumbuhan kota mempunyai kaitan yang cukup erat antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya urbanisasi merupakan unsur yang menjadi latar belakang pembangunan di semua negara. Cepatnya urbanisasi akan menimbulkan masalah manajemen yang kompleks dalam bidang perumahan, transportasi, pemanfaatan lahan, lingkungan, energi, jasa publik, dan sekolah, listrik dan keuangan. Sejalan dengan itu Cheema (1993;4) berpendapat bahwa urbanisasi yang terlalu cepat di negara-negara yang sedang berkembang pada empat dekade terakhir ini telah membawa beberapa konsekuensi negatif seperti kemiskinan perkotaan, tidak cukupnya akses untuk perumahan dan beberapa kebutuhan pelayanan dasar seperti, pemeliharaan kesehatan, air bersih, meluasnya daerah kumuh *(slum area)* dan perkampungan liar serta degradasi lingkungan.

Tingkat urbanisasi yang sangat tinggi di negara berkembang adalah karena ketersediaan energi yang sangat murah, meluasnya pengaruh teknologi pada sektor perkotaan, aliran modal masuk sangat besar, liberalisasi perdagangan dunia, distorsi harga barang dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Persoalan ini akan menyangkut apakah urbanisasi yang berlebihan terjadi dan apakah kebijakan yang lebih efektif yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengarahkan urbanisasi.

Terdapatnya hubungan yang cukup erat antara urbanisasi dan pertumbuhan kota suatu hal yang sudah terlihat kenyataannya secara empirik di lapangan, tampaknya lebih tepat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan hasil dari proses dan pertumbuhan kota.

Kota adalah padat modal. Dengan padat modal kota-kota tumbuh secara cepat dan implikasinya ialah migrasi dari wilayah pedesaan ke perkotaan juga terjadi

[1] Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM

secara sangat cepat. Dalam keadaan demikian timbul masalah kelangkaan lahan pertanian, selanjutnya terjadi substitusi investasi untuk kegiatan pertanian, sehingga peningkatan modal terjadi sangat hebat.

Sering ada kecenderungan bahwasanya pertumbuhan kota yang cepat di negara berkembang terjadi karena tidak ada keseimbangan, sehingga mendorong terjadinya urbanisasi secara berlebihan dan oleh karenanya diperlukan penyesuaian struktural. Para migran pindah ke kota dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang sangat besar, tapi kenyataannya mereka bersedia bekerja pada sektor informal yang berupah rendah, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan keterampilan dari migran yang rendah dan tidak mampu bersaing untuk mendapatkan posisi yang layak dalam pekerjaan sehingga mereka bekerja sesuai dengan apa kemampuan yang mereka bawa dari desa masing-masing. Sehingga mereka lebih banyak bekerja di sektor yang mengandalkan tenaga bukan pikiran (lebih banyak kerja otot bukan otak). Banyaknya kaum migran yang datang ke kota karena masyarakat masih percaya bahwa pindah ke kota dapat menimbulkan perbaikan ekonomi yang lebih baik, anggapan tersebut tidak semuanya benar juga tidak salah, ternyata bagi yang mempunyai tingkat keterampilan tertentu relatif mudah mendapatkan kepercayaan sebaliknya bagi yang tidak mempunyai keterampilan justru menganggur dan akhirnya menimbulkan pengangguran baru di perkotaan.

Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota

Pada tahap awal pembahasan tentang urbanisasi adalah sangat penting untuk menyamakan bahwa apa yang dimaksud dengan urbanisasi itu, mereka yang awam dengan ilmu kependudukan seringkali kurang tepat dalam memakai istilah itu. Dalam pengertian yang sesungguhnya urbanisasi berarti presentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan terhadap total jumlah penduduk. Ini mengandung arti adanya perubahan keseimbangan antara penduduk desa dan kota sebagai akibat arus migrasi desa-kota dan perbedaan tingkat kelahiran alami daerah tersebut (Pernia, 1998;87). Dalam hal ini urbanisasi sebagai fenomena struktural masyarakat berhubungan erat dengan perubahan struktur ekonomi dan menunjukkan adanya perubahan luar/area suatu urban (kota). Namun demikian urbanisasi dan pertumbuhan kota sangat erat hubungannya. Sedangkan mereka yang awam dengan ilmu kependudukan seringkali menafsirkan urbanisasi sebagai perpindahan penduduk dari desa-ke kota, sehingga pemahaman yang demikian seringkali menjebak pemikiran masyarakat untuk berpikir mencari pekerjaan di kota. Padahal perpindahan mereka dari desa ke kota hanyalah salah satu penyebab dari proses urbanisasi, di

samping penyebab-penyebab lainnya yang membuat adanya perluasan daerah-daerah urban atau munculnya daerah-daerah urban yang baru seperti pertumbuhan alamiah penduduk kota, perluasan wilayah merupakan perubahan status wilayah dari desa menjadi kota.

Pengertian lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengertian kota (urban). Kota (urban) dapat didefinisikan menjadi dua pengertian; Pertama, kota dalam artian fungsional yakni daerah yang mempunyai ciri-ciri sebagai daerah perkotaan sebagaimana ditunjukkan oleh kepadatan penduduk, fungsi dan fasilitas ekonomi. Kedua kota dalam artian administratif yakni daerah yang ditentukan sebagai kesatuan unit untuk tujuan administratif misalnya daerah kota. Yang dimaksud dengan kota dalam konteks karya ini adalah kota dalam pengertian fungsional sebagaimana pengertian kota yang digunakan oleh BPS. Kota dalam pengertian fungsional mencakup daerah kota-desa yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) Kepadatan penduduk 5000 orang per Kilometer persegi atau lebih, (2) kurang dari 25 % dari rumah tangga berusaha terutama dalam bidang pertanian dan (3) memiliki lebih dari 8 sarana perkotaan (NUDS, 1985;63)

Sekarang ini pemerintah di samping mengembangkan kebijakan pengarahan penyebaran dan mobilisasi penduduk, termasuk di dalamnya urbanisasi. Pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam menyempurnakan sistem pencatatan mobilitas dan migrasi penduduk sehingga nantinya diharapkan adanya data-data yang cukup lengkap yang berguna untuk pengambilan kebijakan di masa yang akan datang baik dari segi bidang kependudukan maupun bidang-bidang lain yang berkaitan.

Penelitian mengenai proses urbanisasi di negara-negara berkembang termasuk kota-kota di Indonesia tidak terkecuali kota Padang, sangat dipengaruhi oleh teori-teori urbanisasi di Eropa dan Amerika yang berpendapat kota kecil *(Town)* atau kota besar *(City)* adalah pusat kemajuan pembangunan dan pusat perubahan suatu negara.

Ada 5 macam teori klasik dan neo-klasik tentang urbanisasi

1. Teori-teori demografis tentang urbanisasi dan migrasi. Teori-teori ini didominasi oleh model faktor pendorong – penarik, yang memandang kota sebagai faktor penarik sedangkan desa sebagai faktor pendorong. Teori-teori ini cenderung bersifat deskriptif analitis yang terbatas pada *frame work* demografis. Dengan teori ini dapat dilihat bahwa diperlukan proses urbanisasi di Indonesia akan lebih banyak disebabkan migrasi desa-kota. Perkiraan ini dapat didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan serta relatif kuatnya kebijakan ekonomi dan

pembangunan ekonomi yang bias urban sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggal di pedesaan.

2. Teori mengenai sistem kota. Teori ini mencakup antara kegiatan-kegiatan tentang hierarki kota dan tempat-tempat sentral. Seandainya pusat-pusat kota di suatu negara dibedakan menjadi lima kelas yaitu sangat besar, besar, menengah, sedang, kecil dan sangat kecil, maka dapat dikatakan di negara dunia ketiga termasuk Indonesia akan terdapat terlalu banyak kota sangat kecil dan desa-desa, sedangkan kota besar dan sedang tidak terwakili. Ciri lain yang tampak adalah bahwa kota terbesar masih terlalu besar dibandingkan dua kota sedang. Istilah yang kota katakan adalah kota sentral atau kota utama.

   Kota sentral atau kota utama bukan hanya terdapat di kota-kota di dunia ketiga, tetapi juga di negara-negara Eropa. Persoalan yang sering muncul di berbagai kasus pertumbuhan kota di negara dunia keliga sangatlah ekstrim. Pada umumnya pertumbuhan kota disebabkan oleh tingkat kelahiran alami penduduk kota, adanya migrasi desa-kota *(rural urban migration)* yang menyebabkan semakin banyak orang yang tinggal di daerah urban dan adanya reklasifikasi atau redefinisi suatu daerah yang tadinya suatu daerah termasuk pedesaan kemudian diklasifikasikan menjadi urban. Migrasi internasional adalah faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kota untuk beberapa negara tertentu. Seperti Hongkong (Jones, 1991; 9). Dari beberapa faktor pertumbuhan kota di atas nampaknya faktor migrasi desa-kota adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap proses urbanisasi dan pertumbuhan kota. Adapun konsekuensinya dari adanya kota utama adalah sebagian besar penduduk terkonsentrasi di satu bagian kecil wilayah negara, kegiatan ekonomi dan pendapatan tidak seimbang, kota-kota lainnya tidak berkembang, inovasi-inovasi dalam bidang pertanian terhambat, secara politis menimbulkan keresahan yang dapat mendorong separatisme diberbagai daerah kota yang ada di wilayah tersebut karena adanya kecemburuan sosial terhadap pertumbuhan suatu kota dengan kota lain.

3. Teori-teori kultural kota. Teori ini lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek seperti petani di perkotaan atau budaya miskin ataupun aspek-aspek yang berhubungan dengan kesadaran sosial dan perubahan ciri ruang kota.

4. Teori tentang diferensiasi ruang dan sosial serta segregasi (Pemencilan) diperkotaan, yakni ekologi sosial dalam pengertian luas. Analisa wilayah

sosial diperkenalkan oleh Shevky dan Bell dan Ekologi factorial yang dikembangkan oleh Brian Berry.

5. Teori-teori dualis, dengan menggunakan karya-karya peneliti ekonomi politik perkotaan mazhab Perancis (Castell, Lojkine) dan tulisan lain yang mengembangkan teori kota dunia ketiga yakni "urbanisasi dependen".

Dari berbagai teori yang dikemukakan sebelumnya mengidentifikasi adanya suatu perubahan perkembangan penduduk dan pertumbuhan kota. Dengan mengkaitkan proses urbanisasi tidak lepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berhubungan positif dengan peningkatan urbanisasi suatu wilayah. Adanya kecenderungan dengan urbanisasi bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu wilayah yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk cengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi, sehingga apa yang dinamakan sebagai daerah perkotaan.

Urbanisasi yang cepat dan terpusat hanya di suatu kota utama mengakibatkan timbulnya sejumlah masalah seperti kemacetan, polusi dan mengakibatkan timbulnya sejumlah masalah seperti kemacetan, polusi, dan daerah kumuh. Dominasi berlebihan kota utama dapat menghambat pertumbuhan kota-kota lain yang lebih kecil, bahkan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan kota utama berekspansi lebih cepat dibandingkan kota kecil.

Walaupun berbagai studi literatur dan faktor – faktor empirik menunjukkan bahwa gerak perpindahan penduduk sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di beberapa kota dan negara mengembangkan kebijakan perpindahan penduduk lebih terarah, sehingga diharapkan setiap wilayah mempunyai perencanaan yang lebih baik.

Di lain pihak dapat dilihat adanya keterkaitan timbal balik antara aktivitas ekonomi dan konsentrasi penduduk para pelaku ekonomi cenderung melakukan penanaman modal di daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang relatif lengkap. Karena dengan demikian mereka dapat menghemat berbagai biaya yang akan dikeluarkan untuk membiayai proyek-proyek dari hasil investasi untuk masa yang akan datang. Sebaliknya penduduk akan cenderung datang ke pusat kegiatan ekonomi karena di tempat itulah mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping keuntungan secara ekonomi, migran juga berperan meningkatkan keinginan dan mutu sumber daya manusia karena kecenderungan yang terjadi selama ini migran berasal dari daerah yang berkembang atau kota kecil *(town)*

ke daerah yang lebih berkembang atau kota besar *(City)*. Sehingga diharapkan terjadinya transfer pengetahuan yang lebih banyak, akan tetapi kecenderungan lain yang timbul daripada mengalirnya migran dari kota kecil ke kota besar atau sangat besar. Dengan demikian kota yang kecil akan semakin kelinggalan dan stagnan. Sehingga bertahap kota-kota kecil akan kehilangan karakter kota dan alasannya adalah kota akan semakin kecil dan lama-kelamaan akan hilang menjadi sebuah kota yang ditinggalkan oleh penghuninya.

Akan tetapi urbanisasi adalah merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat. Jika urbanisasi adalan suatu proses yang wajar dan sehingga perlu diarahkan. Ada dua alasan yang dikemukakan di sini tentang kebijakan urbanisasi. Pertama, pemerintah berkeinginan untuk sesegera mungkin meningkatkan proposisi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa meningkatnya penduduk daerah perkotaan akan berkaitan erat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Secara empirik data memperlihatkan bahwa suatu negara atau daerah dengan perekonomian yang lebih tinggi juga memiliki tingkat urbanisasi di atas 75 %. Untuk negara Asia, Asia Selatan mempunyai tingkat urbanisasi yang paling rendah yaitu 24,9 %. India merupakan negara paling besar di Asia tingkat urbanisasinya. Tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang diharapkan peningkatan urbanisai bagi negara-negara di Asia Selatan lainnya. Untuk tahun 2010 diharapkan tingkat urbanisasi di negara-negara Asia Selatan tersebut diperkirakan 30-45%. Hal ini terkait dengan mulainya masyarakat berdatangan di kita-kota besar di masing-masing negara tersebut.

Kedua, terjadinya tingkat urbanisasi yang berlebihan atau tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan penduduk perkotaan itu sendiri. Ukuran terkendali suatu proses urbanisasi dapat diartikan sebagai keterkaitan dengan daya tarik kota besar *(city)* pada suatau wilayah terhadap kota-kota lain yang ada disekitarnya. Dalam studi tentang migrasi desa ke kota dikenal adanya perbedaan antara faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong adalah keadaan yang tidak menyenangkan orang-orang di desa sehingga mereka meninggalkan desa menuju kota untuk merubah nasib. Termasuk dalam hal ini adalah pengangguran, penghasilan rendah, minimnya pendapatan yang layak untuk kemanusiaan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta keinginan hidup lebih bebas. Sedangkan faktor penarik adalah kondisi menyenangkan yang ditawarkan oleh kota yaitu fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, rekreasi dan adanya saudara atau kenalan di kota dan upah kerja maupun kesempatan yang tinggi dalam setiap kegiatan atau

bidang kehidupan. Fakta bahwa banyak migran yang mengalami kegagalan di kota namun tetap enggan kembali ke desa, menunjukkan faktor pendorong lebih kuat apabila dibandingkan dengan faktor penarik. Akibatnya desa menjadi kosong karena sebagian besar penduduk desa yang terdiri dari mereka yang belum produktif, hal ini disebabkan oleh bermigrasinya angkatan kerja yang produktif ke kota dengan umur berkisar antara 15-30 tahun sehingga tingkat ketergantungan desa terhadap kota menjadi sangat tinggi.

Kebijaksanaan Urbanisasi di Indonesia

Urbanisasi di Indonesia merupakan salah satu faktor yang masih terus mengalami perkembangan yang dapat mengancam proses perkembangan kota dan desa, bila tidak dikendalikan secara teratur. Tingkat urbanisasi yang terlalau rendah berakibat kurang baik bagi proses pembangunan sebaliknya tingkat urbanisasi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, kebijaksanaan urbanisasi tentu perlu segera dilaksanakan sehingga serasi denga proses pertumbuhan dan perkembangan kota yang ada.

Ada dua kelompok besar kebijaksanaan pengaruhi urbaniasi di Indonesia yang saat ini sedang dikembangkan untuk mengarahkan proses urbanisasi ke arah yang lebih baik. Pertama, dikembangkannya daerah-daerah pedesaan agar memiliki ciri-ciri sebagai daerah perkotaan "urbanisasi Pedesaan". Kedua, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru atau dikenal sebagai "daerah penyanggah pusat pertumbuhan".

Kelompok kebijaksanaan pertama merupakan kelompok yang berusaha untuk mempercepat proses urbanisasi tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melakukan terobosan yang bersifat non-ekonomi. Bahkan diharapkan dengan urbanisasi tersebut akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Untuk itu perlu di dorong pertumbuhan daerah pedesaan agar merupakan ciri-ciri perkolaan, namun tetap dikenal pada nuansa pedesaan. Dengan demikian, penduduk daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai orang kota, walaupun sebenarnya mereka masih tinggal di daerah yang memiliki nuansa pedesaan atau urbanisasi pedesaan misalnya di berbagai pedesaan di Pulau Jawa yang mulai dikembangkan untuk kebijaksanaan ini. Hal-hal yang dikembangkan untuk meningkatkan laju urbanisasi adalah antara lain "modernisasi" daerah pedesaan sehingga memenuhi sifat-sifat perkolaan. Yang dikembangkan adalah bagaimana membangun penduduk pedesaan agar memiliki ciri-ciri perkotaan dalam arti positif tanpa adanya merubah fisik pedesaan secara berlebihan sehingga menghilangkan ciri kas desa tersebut. Telapi bagaimana membangun masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri, dimana sebagian besar

mata pencahariannya bergerak di sektor pertanian, sudah mengenal dan memiliki lembaga keuangan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak sudah dapat di nikmati masyarakat.

Dengan demikian munculnya para penduduk di daerah pedesaan dengan nuansa perkotaan tersebut mereka akan menjadi motor penggerak perekonomian dan tetap mempertahankan keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekosistem alam.

Sedangkan kelompok kebijaksanaan kedua merupakan upaya untuk mengembangkan kota-kota kecil dan sedang yang selama ini ada, dalam rangka untuk mengimbangi kota-kota besar dan metropolitan. Misalnya dengan mengembangkan Kota Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi untuk mendukung perkembangan kota Jakarta sebagai Kota metropolitan. Pada kelompok kebijaksanaan ini, kebijakan pengembangan perkotaan diklasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu (1), kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk merangsang bagi pengembangan kegiatan perkotaan seperti kebijakan penetapan suku bunga pinjaman, penarikan perpajakan bagi peningkatan pendapatan kota. (2) penyebaran secara khusus pola pengembangan kota yang mendukung kebijakan pembangunan nasional menuju pertumbuhan perekonomian yang seimbang, serasi dan berkelanjutan dan (3) peningkatan masalah kinerja masing-masing kota.

Dengan paparan yang dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan dalam pengembangan perkotaan di Indonesia dewasa ini dilandasi pada konsepsi yang meliputi beberapa hal yaitu; pengaturan mengenai sistem-sistem kota yang lebih baik sehingga tidak ada kesenjangan antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, terpadu, berwawasan lingkungan, dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta secara aktif karena keikutsertaan aktif masyarakat dalam pembangunan akan sangat berguna bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Dengan demikian, semakin terpadunya sistem perkotaan yang ada di Indonesia akan terbentuknya suatu penjenjangan kota besar, menengah, kecil yang baik sehingga tidak terjadinya dominasi salah satu kota terhadap kota-kota lainnya sehingga akan menimbulkan hubungan yang baik antara satu kota dengan kota yang lainnya sehingga dimungkinkan antara satu kota dengan kota yang lainnya untuk bekerjasama demi meningkatkan pertumbuhan di masing-masing kota.

Penutup

Urbanisasi sebagai salah satu proses yang wajar dan tidak perlu dicegah pertumbuhannya, karena proses urbanisasi tersebut dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun demikian proses urbanisasi tersebut perlu diarahkan agar tidak terjadi dominasi kota yang satu dengan kota yang lainnya. Ada dua kebijakan yang mengarahkan proses urbanisasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengembangkan apa yang dikenal dengan istilah "urbanisai pedesaan" dan juga mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pinggiran kota. Diharapkan dengan makin tumbuhnya daerah pedesaan dan juga menyebabkan meratanya persebaran daerah perkotaan diharapkan pertumbuhan ekonomi bangsa ini akan menuju ke era yang lebih baik lagi jika dibandingkan dengan yang sebelumnya

Daftar Pustaka

A.G Subarsono, (1997), *Migrasi Dan Urbanisasi Dalam* Diktat Kuliah Problema Pembangunan, Jogjakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada

Cohen, Robin (1996), *Theories Of Migration, The International Library Of Studies On Migration*, Reference Collection, Uk, USA, Brook Field

Hans-Dieter Evers Dan Rudiger Korff, (2002), *Urbanisasi Di Asia Tenggara-Makna Dan Kekuasaan Dalam Ruang – Ruang Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Herlianto, Mth (1997), *Urbanisasi, Pembanguan Dan Kerusuhan Kota*, Bandung: Pt. Alumni

Keban, Yeremias, (1995), *Diktat Kuliah Isu Dan Kebijakan Perkotaan Dan Daerah*, Yogyakarta: Program Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjahmada

Kelley A.C Dan J.G, Williamsan (1987) *What Driver City Growth In The Developing World Dalam The Economics Of Urbanization An Urban Policies In Developing Countries (A World Bank Symposium* Editer By George S Tolley And Vinod Thomes Washington Dc, The World Bank

Kim, Won Bae, (1990) *Population Distribution Policy In China, Review Regional Development Dialogue* Vol. 11 No. 1 Spring

Pernia Em, (1994), *Issues Of Urban And Spetial Development Dalam Urban Property In Asia, Survey Of Critical Issues*, Hongkong Oxford University Press Chapter Two

Prijono Tjiptoherijanto, (2000), *Urbanisasi Dan Perkembangan Perkotaan Di Indonesia*, Artikel Kompas

Reitsma, H.A. Dan Jmg, Kleinpenning, (1985), *Dunia Ketiga Dalam Perspektif*, Assen Netherlands, Rowman Dan Allanhaid Bab 11